

3-23-2021

FOREIGN DIRECT INVESTMENT NEGARA KAMBOJA

Amanda Julia
amandajulia6793@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Banking and Finance Law Commons](#), [Business Organizations Law Commons](#), [Civil Law Commons](#), [Commercial Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), and the [International Law Commons](#)

Recommended Citation

Julia, Amanda (2021) "FOREIGN DIRECT INVESTMENT NEGARA KAMBOJA," *Dharmasisya*: Vol. 1 , Article 2.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss1/2>

This Article is brought to you for free and open access by UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Dharmasisya by an authorized editor of UI Scholars Hub.

FOREIGN DIRECT INVESTMENT NEGARA KAMBOJA

Cover Page Footnote

Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2006), hal. 1. Hulaman Panjaitai dan Aimer Sianipar, *Hukum Penanaman Modal Asing*, (Jakarta: CV. Indhill Co, 2008), hal. 41. Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), hal. 67. Vannarith Chheang, "FDI, Services Liberalisation, and Logistics Development in Cambodia", *Eria Discussion Paper Series*, (March 2017), tersedia <http://www.eria.org/ERIA-DP-2016-39.pdf> Bickel, in. and Breuer, t, FDI in land in developing countries. In *Rural 21 - The international Journal for Rural Development*, Vol. 43, No. 2., 2009, hal. 12. U.S. Department of State, "Cambodia Investment Climate Statement", *Investment Climate Statement*, (May, 2015), hal. 1. Ibid, hal. 2. Royal Embassy of Cambodia in Washington DC (2008): *Information Bulletin November 2008 - Volume 34*. Available at http://www.embassyofcambodia.org/information_bulletin_vol_34.pdf, diunduh 10/12/2017 Organisation for Economic Cooperation and Development. *Foreign Direct Investment and Recovery in Southeast Asia*. Paris: OECD Proceedings, 1999. hal. 32. U.S. Department, op.cit., hal. 4. Ibid, hal. 5. Ibid, hal. 6. Tucker, H.g. *Foreign Large Scale Investments in Agriculture, Hydropower and Mining: Challenges and Opportunities for Development Cooperation in Laos and Cambodia*. Report prepared for GTZ Lao and the Mekong River Commission (MRC), May 2009, hal. 21. U.S. Department, loc.cit. Ray, N. & Bloom G. *Lonely Planet Cambodia* (Travel Guide). Lonely Planet, 2012 Hill, Hal and Prema-chandra Athukorala. 'Foreign Investment in East Asia: A Survey', *Asian-Pacific Economic Literature*, Vol. 12, No. 2 (November 1998), hal. 26. Xing, Y. and Wan G. *Exchange Rates and Competition for FDI in Asia*, *World Economy*, Vol. 29 (4). 2006, hal. 13. U.S. Department, op.cit, hal. 16. Ibid. Kaliappan, S., Khamis, K., and Ismail, N. (2015). *Determinants of Services FDI Inflows in ASEAN Countries*. *International Journal of Economics and Management*, 9 (1), 45 - 69. Available at: <http://psasir.upm.edu.my/39597/1/Determinants%20of%20services%20FDI%20inflows%20in%20Asean%20countries.pdf> Lindblad, J. Thomas. *Foreign Investment in Southeast Asia in the Twentieth Century*. Basingstoke: Macmillan Press, 1998. hal. 23. Buckley, Peter J. 'The Challenges of the New Economy for Multinational Firms: Lessons for Southeast Asia', in Nick Freeman and Frank Bartels (Eds.), *The Future of Foreign Investment in Southeast Asia*. London: Routledge Curzon, forthcoming 2003 Omo K. S. (Ed.) *Southeast Asia's Industrialization: Industrial Policy, Capabilities and Sustainability*. Basingstoke: Palgrave, 2001., hal. 45. U.S. Department, op.cit, hal. 18. U.S. Department of state (2009b): *Investment Climate Statement – Cambodia*, February. Available at: <http://www.state.gov/e/eeb/rls/othr/ics/2009/117418.html> Jones, C., and Temouri, Y. (2016). *The determinants of tax haven FDI*. *Journal of World Business*, 51 (2), 237 - 250.

***FOREIGN DIRECT INVESTMENT* NEGARA KAMBOJA**

Amanda Julia

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
amandajulia6793@gmail.com

Febrina Tania

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
febrinatania93@gmail.com,

Abstrak

Investasi terbagi menjadi 2 (dua), yaitu investasi langsung atau biasa yang disebut dengan *foreign direct investment* dan investasi tidak langsung atau *Foreign indirect investment*. *Foreign direct investment* memberikan manfaat bagi suatu Negara yang menerapkannya, yaitu meningkatkan pembangunan sosial ekonomi, pengurangan kemiskinan serta alih teknologi. Dari banyaknya manfaat *foreign direct investment* tersebut tentu memberikan suatu manfaat yang besar bagi Negara-negara berkembang misalnya Kamboja. Hukum Investasi Kamboja tahun 1994 menetapkan sebuah rezim investasi asing terbuka dan liberal. Semua sektor ekonomi terbuka terhadap investasi asing dan pemerintah mengizinkan 100 persen kepemilikan asing atas perusahaan di sebagian besar sektor. Dalam rangka meningkatkan investasi langsung di Kamboja, pemerintahan membuat banyak reformasi terkait peraturan investasi di Kamboja.

Kata Kunci: Penanaman Modal Asing, *Foreign Direct Investment*, Kamboja.

Abstract

Investment is divided into 2 (two), namely direct investment or commonly known as foreign direct investment and foreign indirect investment. Foreign direct investment provides benefits for a country that applies it, namely increasing socio-economic development, reducing poverty and transferring technology. Of the many benefits of foreign direct investment, it certainly provides a big benefit for developing countries such as Cambodia. The Cambodian Investment Law of 1994 establishes an open and liberal foreign investment regime. All sectors of the economy are open to foreign investment and the government allows 100 percent foreign ownership of companies in most sectors. In order to increase direct investment in Cambodia, the government made many reforms related to investment regulations in Cambodia.

Keywords: Foreign Direct Investment, Cambodia.

I. PENDAHULUAN

Di kalangan masyarakat, kata investasi memiliki pengertian yang lebih luas karena dapat mencakup baik investasi langsung (*direct investment*) maupun investasi tidak langsung (*portfolio investment / indirect investment*), sedangkan kata penanaman modal lebih mempunyai konotasi kepada investasi langsung. Penanaman modal baik langsung atau tidak langsung memiliki unsur-unsur, adanya motif untuk meningkatkan atau setidaknya-tidaknya mempertahankan nilai modalnya.¹

Penanaman modal asing secara langsung menurut *Organization For Economic Cooperation* (OEEC) memberikan rumusan bahwa “*direct investment is meant acquisition of sufficient interest in an under taking to ensure its control by the investor*” (suatu bentuk penanaman modal asing dimana penanam modal diberi keleluasaan penguasaan dan penyelenggaraan pimpinan dalam perusahaan dimana modalnya ditanam, dalam arti bahwa penanam modal mempunyai penguasaan atas modalnya).²

Pengertian yang agak luas dari *foreign direct investment* terdapat pada *Encyclopedia of Public International Law* yang merumuskan *foreign direct investment* sebagai berikut: *A transfer of funds or materials from one country (called capital exporting country) to another country (called host country)*

¹ Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2006), hal. 1.

² Hulman Panjaitai dan Aimer Sianipar, *Hukum Penanaman Modal Asing*, (Jakarta: CV. Indhill Co, 2008), hal. 41.

*in return for a direct participation in the earnings of that enterprise.*³

Selama 2 dekade terakhir, arus masuk investasi langsung asing (FDI) ke Kamboja telah meningkat secara signifikan karena undang-undang investasinya yang liberal dan liberalisasi sektor jasa, termasuk sektor logistik. Liberalisasi sektor jasa dimulai segera setelah keanggotaan negara tersebut dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada tahun 2004 dan di Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) melalui ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) pada tahun 2007. Sektor jasa, akuntansi untuk 42,3% produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2015, memainkan peran penting dalam pengembangan sosial ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas. Di dalamnya, logistik dianggap sebagai sektor strategis untuk konektivitas nasional dan regional, pembangunan sosial ekonomi, dan pengurangan kemiskinan.⁴

Kamboja memiliki rezim investasi asing terbuka dan liberal dengan kerangka hukum dan kebijakan yang relatif pro-investor. Insentif investasi yang tersedia bagi investor asing mencakup 100 persen kepemilikan asing atas perusahaan, hari libur pajak perusahaan sampai delapan tahun, tarif pajak perusahaan 20 persen setelah periode insentif berakhir, impor barang modal bebas bea, dan tidak ada pembatasan pemulangan modal.⁵

Secara historis, insentif ini belum dapat menarik modal A.S. yang signifikan karena berbagai faktor termasuk tingginya tingkat korupsi, terbatasnya pasokan tenaga kerja terampil, infrastruktur yang tidak memadai (termasuk biaya energi yang tinggi), dan kurangnya transparansi dalam proses persetujuan pemerintah. Kebuntuan politik dan kerusuhan buruh yang mengikuti pemilihan nasional 2013 merupakan tambahan penghalang terhadap investasi. Baru-baru ini, bagaimanapun, Zona Ekonomi Khusus Phnom Penh telah menarik lebih dari USD 100 juta investasi dari beberapa perusahaan Amerika besar, termasuk Coca-Cola, Tiffany & Co., dan American Licorice.⁶

Setelah pemilihan nasional 2013, pemerintah mengumumkan berbagai reformasi ekonomi dan bisnis. Pemerintah juga bergerak maju dengan undang-undang baru untuk memenuhi batas akhir 2015 untuk Komunitas Ekonomi ASEAN (Asosiasi Ekonomi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara).⁷

Mengacu pada latar belakang permasalahan, penulis akan mengulas beberapa sub bahasan terkait FDI dan Indirect Investment di Negara Kamboja sebagaimana berikut ini:

1. Peraturan-peraturan nasional yang berlaku untuk investasi asing baik langsung atau tidak langsung;
2. Institusi utama dalam investasi langsung atau tidak langsung;
3. Institusi-institusi terkait dalam investasi langsung atau tidak langsung;
4. Kebijakan investasi yang dianut Negara apakah terbuka atau tertutup;
5. Bidang usaha yang terbuka untuk investasi asing (FDI);
6. Persyaratan dan proses atau mekanisme untuk melakukan investasi langsung atau tidak langsung;
7. Insentif investasi; dan
8. Jumlah perjanjian investasi internasional yang dimiliki dan dengan Negara mana.

³ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), hal. 67.

⁴ Vannarith Chheang, "FDI, Services Liberalisation, and Logistics Development in Cambodia", *Eria Discussion Paper Series*, (March 2017), tersedia <http://www.eria.org/ERIA-DP-2016-39.pdf>

⁵ Bickel, in. and Breuer, t, *FDI in land in developing countries*. In *Rural 21 - The international Journal for Rural Development*, Vol. 43, No. 2., 2009, hal. 12.

⁶ U.S. Department of State, "Cambodia Investment Climate Statement", *Investment Climate Statement*, (May, 2015), hal. 1.

⁷ *Ibid*, hal. 2.

II. PEMBAHASAN

Kamboja memulai transformasi dari sebuah komando ke ekonomi pasar bebas pada akhir 1980an. Sekarang mengintegrasikan ke dalam kerangka perdagangan regional dan dunia. Kamboja bergabung dengan ASEAN pada tahun 1999 dan menjabat sebagai kursi pada tahun 2012. Pada tahun 2001, negara ini bergabung dengan Organisasi Pabean Dunia, dan pada bulan September 2004, menjadi salah satu Negara Lesser Developed pertama yang menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).⁸

Hukum Investasi Kamboja tahun 1994 menetapkan sebuah rezim investasi asing terbuka dan liberal. Semua sektor ekonomi terbuka terhadap investasi asing dan pemerintah mengizinkan 100 persen kepemilikan asing atas perusahaan di sebagian besar sektor. Di beberapa sektor, seperti manufaktur rokok, produksi film, penggilingan beras, penambangan batu permata dan pengolahan, penerbitan dan pencetakan, radio dan televisi, produksi ukiran kayu dan batu, dan tenunan sutra, investasi asing tunduk pada penyertaan modal lokal atau otorisasi sebelumnya. dari pihak berwenang Ada sedikit atau tidak ada diskriminasi terhadap investor asing baik pada saat investasi awal atau setelah investasi. Beberapa perusahaan asing, bagaimanapun, telah melaporkan bahwa mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan berhadapan dengan saingan Kamboja atau saingan asing lainnya yang terlibat dalam tindakan korupsi atau penghindaran pajak atau memanfaatkan peraturan hukum dan peraturan Kamboja yang buruk. Dewan Bar Kamboja secara berkala mengambil tindakan untuk membatasi atau menghalangi pekerjaan pengacara asing atau firma hukum asing.⁹

Sesuai dengan persyaratan WTO, Kamboja melakukan tinjauan pertama atas kebijakan dan praktik perdagangan pada bulan November 2011. Kajian berikutnya akan dilakukan pada tahun 2017.¹⁰

Sebagai tanggapan atas rekomendasi tinjauan kebijakan perdagangan, Kamboja telah melakukan reformasi sebagai berikut:¹¹

1. Penghapusan persyaratan *Certificate of Origin* untuk ekspor ke negara-negara dimana sertifikat tidak diperlukan;
2. Pelaksanaan pendaftaran bisnis *online*;
3. Adopsi proses perekrutan yang kompetitif untuk staf Kementerian Perdagangan;
4. Pelaksanaan langkah-langkah evaluasi risiko untuk Inspeksi Ekspor-Impor Kamboja dan Direktorat Penipuan Kecurangan (*CamControl*) dan pembuatan unit manajemen risiko *Cam Control*;
5. Pengesahan UU Pengadaan Umum;
6. Pemberlakuan tiga undang-undang sistem peradilan: Undang-undang tentang Peradilan, Undang-Undang tentang Tugas dan Disiplin Hakim dan Jaksa, dan Undang-Undang tentang Organisasi dan Fungsi Dewan Tinggi Magistral;
7. Pembuatan Pengadilan Niaga sebagai Pengadilan Tingkat Pertama;
8. Pembuatan biro kredit;
9. Pembentukan Regulator Telekomunikasi Kamboja (TRC); Pada tahun 2012, Kementerian Pos dan Telekomunikasi mengalihkan peraturan tersebut kepada KKR;

⁸ Royal Embassy of Cambodia in Washington DC (2008): *Information Bulletin November 2008 - Volume 34*. Available at http://www.embassyofcambodia.org/information_bulletin_vol_34.pdf, diunduh 10/12/2017

⁹ Organisation for Economic Cooperation and Development. *Foreign Direct Investment and Recovery in Southeast Asia*. Paris: OECD Proceedings, 1999. hal. 32.

¹⁰ U.S. Department, *op.cit.*, hal. 4.

¹¹ *Ibid*, hal. 5.

10. Pengesahan UU Telekomunikasi pada bulan Desember 2015; dan
11. Pengesahan UU Kesehatan dan Produksi Hewan pada bulan Februari 2016.
Reformasi yang sedang berlangsung atau direncanakan mencakup hal-hal berikut:¹²
 1. Perubahan terhadap Undang-Undang tentang Standar;
 2. Menerapkan hukum persaingan;
 3. Menerapkan UU Kawasan Ekonomi Khusus;
 4. Menerapkan Undang-Undang Keamanan Pangan; dan
 5. Menerapkan Undang-undang tentang *E-Commerce*.

Meskipun Konstitusi Kamboja menyerukan sebuah peradilan yang independen investor asing pada umumnya enggan menggunakan sistem peradilan Kamboja untuk menyelesaikan sengketa komersial karena pengadilan dianggap tidak dapat dipercaya dan rentan terhadap pengaruh politik atau penyuapan eksternal. Meskipun pemerintah Kamboja memberlakukan Undang-Undang tentang Susunan Pengadilan pada bulan Juli 2014 dalam upaya meningkatkan profesionalisme peradilan dan mencegah korupsi dan pengaruh politik eksternal, korupsi tetap endemik dalam sistem peradilan.

Undang-undang tentang Investasi Kamboja tahun 1994 membuat skema perizinan investasi untuk mengatur proses persetujuan investasi langsung asing dan memberikan insentif kepadacalon investor. Pada bulan Maret 2003, pemerintah menyederhanakan skema perizinan dan meningkatkan transparansi dan prediktabilitas dengan memberlakukan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Penanaman Modal (Amandemen Hukum Investasi). Skema perizinan untuk investasi kurang dari \$2 juta diklarifikasi dalam sub-keputusan tentang Pembentukan Sub-Komite untuk Investasi di Provinsi-Kotamadya Kerajaan Kamboja pada bulan Februari 2005. Keputusan No. Ill tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Penanaman Modal, yang dikeluarkan pada bulan September 2005, menjelaskan prosedur rinci untuk mendaftarkan Proyek Investasi Berkualitas (QIP), yang berhak mendapatkan insentif perpajakan tertentu, dengan Dewan untuk Pembangunan Kamboja dan pemerintah provinsi / sub-komite investasi kota.¹³

Adapun Registrasi Bisnis di Kamboja adalah :¹⁴

1. Sebagai persyaratan minimum, semua bisnis diharuskan mendaftar ke Kementerian Perdagangan dan Departemen Kehakiman (GDT). Pada bulan Januari 2016, Kementerian Perdagangan meluncurkan portal pendaftaran bisnis online yang memungkinkan semua bisnis yang ada dan baru mendaftarkan perusahaan mereka di: <http://www.businessregistration.moc.gov.kh>. Informasi tentang proses pendaftaran bisnis online tersedia di situs MoC di www.moc.gov.kh/en-us/company-registration. Link ini juga menyediakan sumber informasi untuk berbagai jenis dokumen pendaftaran bisnis. Pendaftaran bisnis baru memakan waktu sekitar dua minggu. Bergantung pada jenis kegiatan bisnis, bisnis baru juga diminta untuk mendaftar ke kementerian terkait lainnya. Misalnya, biro perjalanan harus mendaftar di Kementerian Pariwisata dan universitas swasta harus mendaftar ke Kementerian Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, selain mendaftar ke Kementerian Perhubungan dan GDT. Perusahaan asing bisa menggunakan sistem registrasi online. Namun, kesulitan dalam menyelesaikan pendaftaran, seperti masalah teknis atau bahasa, telah menyebabkan beberapa perusahaan asing dan domestic mencari bantuan profesional untuk mendaftar atau mendaftar ulang.

¹² *Ibid*, hal. 6.

¹³ Tucker, H.g. *Foreign Large Scale Investments in Agriculture, Hydropower and Mining: Challenges and Opportunities for Development Cooperation in Laos and Cambodia*. Report prepared for GTZ Lao and the Mekong River Commission (MRC), May 2009, hal. 21.

¹⁴ U.S. Department, *loc.cit*.

2. Dewan Pengembangan Kamboja mempromosikan dan menyetujui investasi di Kamboja dan memberikan insentif investasi kepada perusahaan-perusahaan dengan QIP. Kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi kelayakan QLP mencakup jumlah modal investasi dan kegiatan usaha yang terdaftar.
3. “Kerangka Pengembangan UKM” yang dikembangkan oleh Sub-Komite UKM Komite Pengarah Sektor Swasta mengklasifikasikan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sesuai dengan jumlah karyawan dan ukuran aset mereka. Perhitungan karyawan didasarkan pada jumlah karyawan penuh waktu. Tingkat klasifikasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tercantum dalam tabel di bawah ini. Tidak ada kebijakan atau manfaat khusus untuk mempromosikan UKM saat ini. Pemerintah Jepang membantu MoIH dalam menyusun kebijakan untuk membantu UKM namun tidak ada tanggal pelaksanaan yang diumumkan.

Pemerintah telah mengidentifikasi sektor pertanian dan investasi berorientasi ekspor sebagai sektor prioritas. Dalam upaya untuk mempromosikan dan menarik investasi di sektor-sektor ini, pemerintah menawarkan program insentif termasuk pengurangan atau pembebasan pajak impor untuk bahan.

Ada sedikit keterbatasan kontrol asing di Kamboja. Investor asing mungkin memiliki 100 persen proyek investasi mereka kecuali di sektor manufaktur rokok, produksi film, penggilingan beras, penambangan batu permata dan pengolahan, penerbitan dan pencetakan, radio dan televisi, produksi ukiran kayu dan batu, dan tenunan sutra. Menurut Undang-undang tentang Perubahan Investasi Kamboja dan sub-keputusan terkait, tidak ada Batasan berdasarkan kewarganegaraan pemegang saham atau diskriminasi terhadap investor asing kecuali dalam kaitannya dengan investasi pada properti riil atau badan usaha milik negara. Undang-undang tentang Investasi dan Perubahan Anggaran Investasi menyatakan bahwa kepentingan mayoritas di tanah harus dipegang oleh satu atau lebih warga Kamboja. Berdasarkan Undang-Undang tentang Perusahaan Publik, pemerintah Kamboja harus secara langsung atau tidak langsung memiliki lebih dari 51 persen modal atau hak untuk memilih di badan usaha milik negara.

Terkait Program Privatisasi, di Kamboja Tidak ada program privatisasi yang sedang berlangsung.

Investasi langsung asing harus didaftarkan di Kementerian Perdagangan, dan investor harus mendapatkan izin operasi dari kementerian terkait. Jika investor asing mencari insentif investasi sebagai Proyek Investasi Berkualitas, dia harus mendaftar dan menerima persetujuan dari Dewan Pengembangan Kamboja atau Sub-Komite Investasi Propinsi-Kota. Permohonan kepada Dewan Pengembangan Kamboja dapat dilakukan baik sebelum atau sesudah pendaftaran di Kementerian Perdagangan.

Adapun Prosedur aplikasi investasi di Kamboja adalah:

1. Proses Aplikasi QIP di luar KEK

Diakui sebagai proyek investasi yang memenuhi syarat, investor harus mendaftarkan proyek investasi tersebut dengan CDC atau PMIS dan menerima Sertifikat Pendaftaran Akhir (FRC) berdasarkan Undang-Undang tentang Investasi (Pasal 2 dan 6, "Mengubah Undang-undang tentang Investasi"). Proses aplikasi QIP dari penyerahan Proposal Investasi sampai mendapatkan Surat Tanda Pendaftaran Akhir (Final Registration Certificate - FRC) ditunjukkan pada tabel berikut (Pasal 7, “Perubahan Anggaran Investasi”).

Aplikasi proyek investasi yang memenuhi syarat dalam Praktek adalah meskipun Pasal 7 “Perubahan Anggaran Investasi” menetapkan proses aplikasi QIP sebagaimana dijelaskan di atas, ada beberapa perbedaan antara ketentuan “Undang-Undang tentang Investasi yang Diubah” (UU) dan Keputusan “No. 11 di atas Pelaksanaan Perubahan atas Undang-Undang tentang Penanaman Modal” (Sub-Keputusan). Dalam prakteknya, ketentuan Sub-Keputusan tersebut diterapkan pada proses aplikasi QIP oleh CDC. Perbedaan utama adalah sebagai

berikut.

- 1) Meskipun Undang-undang menetapkan CRC diterbitkan dalam waktu 3 hari kerja setelah diajukannya Proposal Investasi, maka Sub-Keputusan tersebut diatur dalam Pasal 6.1 (d) bahwa “CDC atau PMIS berhak untuk menunda pendaftaran Proyek Investasi tertentu. terkait dengan kepentingan nasional atau sensitif terhadap lingkungan yang harus diproses melalui mekanisme satu atap Dewan dan Sub-Komite Investasi Propinsi / Daerah yang harus memberitahukan alasan spesifik kepada pemohon dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja penyerahan proposal investasi Kenyataannya, CRC jarang diterbitkan dalam waktu 3 hari kerja dan sebagian besar proyek investasi, kecuali di garmen dan alas kaki yang dianggap sebagai proyek rutin atau yang berlokasi di KEK, akan diproses dalam Rapat Satu-Stop CDC. Karena itu, dibutuhkan waktu lebih lama untuk mendapatkan CRC. Proyek investasi yang berlokasi di KEK tersebut tidak akan diproses dalam One Stop Meeting CDC.
- 2) Undang-undang tersebut menetapkan bahwa CDC harus memperoleh semua lisensi yang diperlukan dari instansi terkait - entitas yang terdaftar dalam CRC atas nama Pemohon dalam waktu 28 hari kerja setelah penerbitan CRC. Sub-Keputusan tersebut berdasarkan Pasal 7.1, bagaimanapun, bahwa "setelah menerbitkan CRC, CDC atau PMIS, atas nama Pemohon, membantu dengan dikeluarkannya persetujuan, otorisasi, lisensi, izin atau pendaftaran yang terdaftar dalam CRC oleh departemen terkait, departemen, otoritas, badan provinsi / kotamadya atau instansi Pemerintah Kerajaan, Dalam prakteknya, pemohon QIP diharapkan mendapatkan otorisasi, lisensi atau registrasi tersebut.

2. Proses Pendaftaran Aplikasi proyek investasi yang memenuhi syarat Proyek Investasi di KEK

Investor Zona yang memulai aktivitas produksi atau layanan di lapangan yang diizinkan oleh Hukum dan Sub-Keputusan terkait di setiap KEK harus melengkapi formalitas berdasarkan prosedur dengan mempersiapkan semua dokumen yang dipersyaratkan dan menyerahkan ke kantor Administrasi SEZ di SEZ untuk mendaftarkan proposal investasi selama jam kerja dan sebelum kantor Administrasi SEZ. Administrasi SEZ memiliki kewajiban untuk memutuskan pendaftaran proposal investasi berdasarkan aspek hukum, administratif dan teknis dan penerbitan FRC. Proses tersebut harus sesuai dengan prosedur pendataan investasi yang tercantum dalam UU dan Sub-Keputusan tentang Penerapan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Penanaman Modal.

Setiap insentif yang diberikan kepada Investor Zona diputuskan oleh Administrasi KEK melalui mekanisme “Pelayanan Satu Pintu” yang ada di lokasi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas semua permintaan lain dalam proses investasi Zone Investors, Administrasi SEZ akan memainkan peran fasilitator untuk menangani ISU-ISU Investor Zona dengan kementerian / institusi terkait dan Pemerintah Kerajaan Kamboja (Pasal 3.3, Subskala KEK).

Terkait konversi modal bagi investor, maka tidak ada batasan konversi modal bagi investor. Hukum Devisa Kamboja tahun 1997 menyatakan bahwa tidak boleh ada pembatasan operasi valuta asing melalui bank-bank yang berwenang. Bank-bank yang berwenang diminta untuk melaporkan jumlah transfer yang setara atau melebihi USD 100.000 ke Bank Nasional Kamboja secara reguler.

Pinjaman dan pinjaman, termasuk kredit perdagangan, bebas dikontrak antara penduduk dan bukan penduduk, asalkan pencairan dan pembayaran pinjaman dilakukan melalui perantara yang berwenang.

Undang-undang Foreign Exchange memungkinkan Bank Nasional menerapkan kontrol

pertukaran jika terjadi krisis valuta asing. Jika terjadi krisis seperti itu. Bank Nasional dapat memberlakukan pembatasan sementara tertentu untuk jangka waktu maksimum tiga bulan pada posisi aktivitas atau posisi devisa dari perantara yang berwenang atau atas pinjaman dalam mata uang domestik yang diberikan kepada bukan penduduk. Departemen Luar Negeri tidak mengetahui adanya kasus di mana investor menghadapi hambatan dalam mengkonversi mata uang lokal menjadi mata uang asing atau mengirim modal keluar negeri.

Terkait Kebijakan Pengiriman Uang, maka menurut Pasal II Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Penanaman Modal tahun 2003 menyatakan bahwa Proyek Investasi Berkualitas dapat dengan bebas mengirimkan uang asing ke luar negeri, yang dibeli melalui bank-bank yang berwenang, untuk melunasi kewajiban keuangan yang timbul sehubungan dengan investasi mereka.

Selain itu adapun Kewajiban keuangan ini meliputi:

1. Pembayaran untuk impor dan pelunasan pokok dan bunga atas pinjaman internasional;
2. Pembayaran royalti dan biaya pengelolaan;
3. Remitansi keuntungan; dan
4. Pemulangan modal yang diinvestasikan jika terjadi pembubaran.

Terkait Status Task Force (FATF), maka Kamboja telah berkomitmen untuk bekerja sama dengan FATF dan the Asia Pacific Group (APG) untuk mengatasi kekurangan strategis Anti Pencucian Uang / Pemberantasan Pembiayaan Terorisme (AML / CFT). Situs FATF menyatakan bahwa Kamboja telah membuat kemajuan yang signifikan dalam memperbaiki rezim AML / CFT-nya dan mencatat bahwa Kamboja telah membentuk kerangka hukum dan peraturan untuk memenuhi komitmennya dalam rencana tindakannya mengenai defisiensi strategis yang telah diidentifikasi FATF pada bulan Juni 2011. Kamboja Oleh karena itu, tidak lagi tunduk pada proses pemantauan FATF dalam proses kepatuhan AML / CFT global yang sedang berlangsung. Kamboja akan bekerja sama dengan APG karena terus menangani berbagai masalah AML / CFT yang diidentifikasi dalam laporan evaluasi bersama.¹⁵

Terkait Pengambilalihan dan Kompensasi, maka di Kamboja, Hak atas tanah adalah isu yang diperdebatkan di Kamboja, yang diperumit oleh kenyataan bahwa sebagian besar pemegang properti tidak memiliki dokumentasi hukum tentang hak kepemilikan mereka sebagai akibat era Khmer Merah. Sejumlah kasus telah dilaporkan mempengaruhi orang atau kelompok yang memperoleh hak kepemilikan tanah atau konsesi melalui hubungan politik dan / atau keuangan, dan kemudian menggunakan kekuatan untuk menggantikan masyarakat untuk menghasilkan keuntungan bagi usaha komersial. Pada akhir 2009, Majelis Nasional menyetujui Undang-Undang tentang Pengambilalihan, yang menetapkan pedoman umum mengenai prosedur pengambilan lahan untuk kepentingan umum. Ini mendefinisikan kegiatan kepentingan umum untuk memasukkan konstruksi, rehabilitasi, pelestarian, atau perluasan proyek infrastruktur, dan pengembangan bangunan untuk pertahanan nasional dan keamanan sipil. Ketentuan ini meliputi pembangunan pos penyeberangan, pembangunan fasilitas untuk penelitian dan eksploitasi sumber daya alam, dan pembangunan jaringan pipa minyak dan gas. Properti juga bisa dimanfaatkan untuk bencana alam dan keadaan darurat, seperti yang ditentukan oleh pemerintah. Prosedur hukum mengenai kompensasi dan banding diharapkan dapat ditetapkan dalam sub-keputusan yang akan datang, yang diharapkan dapat diajukan ke dewan perselingkuhan Kementerian Ekonomi dan Keuangan pada pertengahan tahun 2015. Departemen Luar Negeri tidak mengetahui adanya kasus di mana Kamboja telah mengambil alih investasi A.S.

Terkait Penyelesaian Sengketa Investasi, maka Sebagian besar investor pada

¹⁵ Ray, N. & Bloom G. *Lone Planet Cambodia (Travel Guide)*. Lonely Planet, 2012

umumnya enggan menggunakan sistem peradilan Kamboja untuk menyelesaikan sengketa komersial karena pengadilan dianggap tidak dapat dipercaya dan rentan terhadap pengaruh politik eksternal atau penyuapan.¹⁶ Baik bisnis lokal maupun asing melaporkan seringnya masalah dengan keputusan pengadilan yang tidak konsisten, korupsi, dan kesulitan menegakkan keputusan. Untuk alasan ini, sebagian besar sengketa komersial saat ini diselesaikan melalui negosiasi yang difasilitasi oleh Kementerian Perdagangan, Dewan Pengembangan Kamboja, Kamar Dagang Kamboja, atau institusi terkait lainnya.

Kamboja mengadopsi Undang-undang Arbitrase Komersial pada tahun 2006.¹⁷ Pada tahun 2010, pemerintah menyediakan pembentukan Badan Arbitrase Komersial Nasional (NCAC), mekanisme penyelesaian sengketa alternatif pertama di Kamboja, untuk memungkinkan perusahaan menyelesaikan perselisihan komersial lebih cepat dan murah daripada melalui pengadilan sistem. NCAC diluncurkan secara resmi pada bulan Maret 2013 dan sekarang siap menerima kasus. Tiga undang-undang yang terkait dengan sistem peradilan diundangkan pada bulan Juli 2014: Undang-undang tentang Peradilan Undang-Undang tentang Tugas dan Disiplin Hakim dan Jaksa, dan Undang-Undang tentang Organisasi dan Fungsi Dewan Tinggi Magistral. Berdasarkan Undang-Undang tentang Susunan Pengadilan, Pengadilan Niaga, yang ditetapkan sebagai satu dari empat Pengadilan Tinggi Pertama, akan memiliki yurisdiksi atas semua masalah komersial, termasuk kasus-kasus kepailitan. Kamar Dagang akan mendengar semua permohonan banding yang timbul dari Pengadilan Niaga.¹⁸

Terkait Kebangkrutan, maka Undang-undang tentang Kepailitan Kamboja tahun 2007 dimaksudkan untuk memberikan kepuasan klaim kreditur kolektif, teratur, dan adil dari properti debitur dan, jika sesuai, rehabilitasi bisnis debitur. Hukum tentang Kepailitan berlaku untuk aset semua pelaku bisnis dan badan hukum di Kamboja. Laporan Doing Business Bank Dunia 2015 menempatkan Kamboja 84 dari 189 dalam hal kemudahan menyelesaikan kebangkrutan, sebuah peningkatan dramatis dari tahun 2014 ketika berada di peringkat 163 dari 189.¹⁹

Terkait Arbitrase Internasional di Kamboja, maka Arbitrase internasional tersedia untuk perselisihan komersial Kamboja. Pada bulan Maret 2014, Mahkamah Agung Kamboja mengkonfirmasi keputusan Pengadilan Banding Kamboja, yang telah memutuskan untuk mendukung pengakuan dan penegakan putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh Badan Arbitrase Komersial Korea (KCAB) Seoul, Korea Selatan. Kamboja menjadi anggota Pusat Penyelesaian Sengketa Investasi Internasional Bank Dunia pada bulan Januari 2005. Pada tahun 2009, Pusat Internasional menyetujui permintaan arbitrase investor AS dalam sebuah kasus melawan pemerintah Kamboja, dan pada tahun 2013 pengadilan tersebut memberikan sebuah penghargaan yang dimenangkan dari Kamboja.²⁰

Di dalam negeri, sengketa komersial juga dapat diselesaikan melalui *National Commercial Arbitration Centre* (NCAC), mekanisme penyelesaian sengketa alternative pertama Kamboja, yang diluncurkan secara resmi pada bulan Maret 2013.

Kamboja adalah anggota dari *International Centre for settlement of Investment Disputes* (ICSID). Kamboja juga merupakan penandatanganan *New York Convention on the Recognition and Enforcement*

¹⁶ Hill, Hal and Prema-chandra Athukorala. 'Foreign Investment in East Asia: A Survey', Asian-Pacific Economic Literature, Vol. 12, No. 2 (November 1998), hal. 26.

¹⁷ Xing, Y. and Wan G. *Exchange Rates and Competition for FDI in Asia*, World Economy, Vol. 29 (4). 2006, hal. 13.

¹⁸ U.S. Department, *op.cit*, hal. 16.

¹⁹ *Ibid*.

²⁰ Kaliappan, S., Khamis, K., and Ismail, N. (2015). Determinants of Services FDI Inflows in ASEAN Countries. *International Journal of Economics and Management*, 9 (1), 45 - 69. Available at: <http://psasir.upm.edu.my/39597/1/Determinants%20of%20services%20FDI%20inflows%20in%20Asean%20countries.pdf>

of *Foreign Arbitral Awards* 1958 (Konvensi New York) sejak tahun 1960.²¹ Pada tahun 2001, Kamboja mengeluarkan Undang-undang tentang Persetujuan dan Implementasi Konvensi Nasional Bersatu mengenai Pengakuan dan Penegakan dari *Foreign Arbitral Awards*.

Karena korupsi dan sistem birokrasi yang terlalu ketat, perselisihan investasi / komersial mungkin akan memakan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan.²²

Pada dasarnya, semua investasi perlu didaftarkan ke Kementerian Perdagangan. Amandemen Undang-undang Investasi Kamboja juga menyediakan mekanisme insentif investasi (ada berbagai jenis insentif) yang memenuhi kriteria yang ditentukan. Investor yang mencari insentif investasi harus mengajukan permohonan ke Dewan Investasi Kamboja, sebuah divisi dibawah Dewan Pengembangan Kamboja yang dituntut untuk meninjau aplikasi investasi. Kegiatan investasi yang dikecualikan dari insentif dirinci dalam Sub-Keputusan pada bulan September 2005 tentang Pelaksanaan Perubahan atas Undang-Undang tentang Penanaman Modal. Ini termasuk sektor berikut: toko eceran, grosir, dan bebas bea; tempat hiburan (termasuk restoran, bar, klub malam, panti pijat, dan kasino); penyedia layanan pariwisata; mata uang dan jasa keuangan; kegiatan pers dan media; layanan profesional; dan produksi dan pengolahan produk tembakau dan kayu. Insentif juga mungkin tidak diterapkan pada investasi dalam produksi produk tertentu jika investasinya kurang dari USD 500.000.²³

Ini termasuk makanan dan minuman; tekstil, pakaian, dan alas kaki; dan produk plastik, karet, dan kertas. Investor tidak diharuskan untuk menempatkan deposit yang menjamin investasinya kecuali dalam kasus-kasus yang melibatkan kontrak konsesi atau proyek pengembangan real estat. Investor yang ingin mengajukan permohonan diharuskan membayar biaya aplikasi sebesar tujuh juta riel (sekitar Rp 1.750), yang merupakan biaya administrasi untuk mendapatkan persetujuan, otorisasi, lisensi, atau registrasi yang diperlukan dari semua kementerian dan entitas terkait, termasuk bea materai. Berdasarkan sub-keputusan tahun 2008, Dewan untuk Pembangunan Kamboja diminta untuk meminta persetujuan dari Dewan Menteri untuk proposal investasi yang melibatkan investasi modal sebesar USD 50 juta atau lebih, isu-isu sensitif secara politis, eksplorasi dan eksploitasi mineral atau sumber daya alam, atau konsesi infrastruktur. Dewan Pembangunan Kamboja juga diminta untuk meminta persetujuan dari Dewan Menteri untuk proposal investasi yang akan berdampak negatif terhadap lingkungan atau strategi jangka panjang pemerintah.²⁴

Proyek Investasi yang telah memenuhi syarat (*Qualified Investment Projects*) berhak menerima insentif berbeda seperti pembebasan pajak keuntungan, penyusutan khusus, dan bebas bea impor peralatan produksi dan bahan bangunan. Proyek investasi yang berada di zona promosi khusus yang ditunjuk atau zona pemrosesan ekspor juga berhak mendapat insentif yang sama. Insentif investasi spesifik industri, seperti pembebasan pajak tiga tahun, mungkin tersedia di sektor pertanian dan agroindustri. Bahan pertanian yang digunakan sebagai input dalam industri ekspor dapat dikecualikan dari pajak pertambahan nilai.²⁵

Seperti yang telah dijelaskan di atas, tidak ada batasan mengenai hak entitas asing dan domestik untuk mendirikan dan memiliki perusahaan bisnis atau bersaing dengan perusahaan

²¹ Lindblad, J. Thomas. *Foreign Investment in Southeast Asia in the Twentieth Century*. Basingstoke: Macmillan Press, 1998. hal. 23.

²² Buckley, Peter J. 'The Challenges of the New Economy for Multinational Firms: Lessons for Southeast Asia', in Nick Freeman and Frank Bartels (Eds.), *The Future of Foreign Investment in Southeast Asia*. London: Routledge Curzon, forthcoming 2003

²³ Omo K. S. (Ed.) *Southeast Asia's Industrialization: Industrial Policy, Capabilities and Sustainability*. Basingstoke: Palgrave, 2001., hal. 45.

²⁴ U.S. Department, *op.cit*, hal. 18.

²⁵ U.S. Department of state (2009b): *Investment Climate Statement – Cambodia*, February. Available at: <http://www.state.gov/e/eeb/rls/othr/ics/2009/117418.html>

publik. Hanya warga Kamboja atau badan hukum, bagaimanapun, memiliki hak untuk memiliki tanah. Berdasarkan Undang-Undang Pertanahan tahun 2001, investor asing dapat memperoleh penguasaan lahan melalui *Economic Land Concessions* (ELC), sewa jangka panjang, atau sewa jangka pendek yang dapat diperbaharui. Pada bulan Mei 2012, pemerintah mengeluarkan moratorium pemberian ELC baru.²⁶

Sejak saat itu, ada beberapa ELC baru yang diberikan, yang dibenarkan oleh pemerintah dengan menyatakan bahwa setiap ELC di mana pihak-pihak tersebut dalam negosiasi pribadi atau telah mencapai kesepakatan "secara prinsip" sebelum perintah tersebut dapat berlanjut sampai penerbitan. Pada bulan Oktober 2012, Perdana Menteri

Hun Sen mengulangi dukungannya untuk moratorium ELCs baru. Pada tahun 2014, Menteri Lingkungan Hidup membatalkan 23 ELC dengan luas sekitar 90.0(H) hektar lahan, seolah-olah gagal mengembangkan lahan sesuai dengan persyaratan ELC.

Investor yang memenuhi syarat yang disetujui oleh Dewan Pengembangan Kamboja memiliki hak untuk memiliki bangunan yang dibangun di atas properti sewaan. Namun, undang-undang tersebut tidak jelas apakah bangunan dari proyek berkualitas dapat ditransfer antara investor asing atau apakah investor asing dapat memiliki bangunan yang dibangun melalui proyek yang tidak disetujui oleh Dewan Pengembangan Kamboja.

Pada tahun 2010, Kamboja mengadopsi undang-undang yang mengizinkan kepemilikan asing terbatas di gedung bertingkat dari lantai dua, sehingga kepemilikan tidak boleh melebihi 70 persen dari luas semua unit swasta bangunan milik bersama. Orang asing tidak berwenang untuk memperoleh hak kepemilikan di bangunan yang berada dalam jarak 30 kilometer dari perbatasan darat Kamboja. kecuali di Kawasan Ekonomi Khusus atau daerah lainnya, sebagaimana ditentukan oleh pemerintah.

III. KESIMPULAN

Peraturan Nasional yang berlaku untuk investasi asing langsung atau tidak langsung di Kamboja adalah Hukum Tentang Investasi Kerajaan Kamboja (05 Agustus 1994) dan Amendemennya (24 Maret 2003). Institusi utama dalam untuk investasi asing langsung atau tidak langsung di Kamboja adalah Kementerian Perdagangan. Institusi terkait dalam untuk investasi asing langsung atau tidak langsung di Kamboja Dewan Investasi Kamboja, yang merupakan divisi dibawah *Council for the Development of Cambodia*. Kebijakan investasi yang dianut negara kamboja adalah investasi asing terbuka dan liberal dengan kerangka hukum dan kebijakan yang relatif pro-investor. Insentif investasi yang tersedia bagi investor asing mencakup 100 persen kepemilikan asing atas perusahaan, hari libur pajak perusahaan sampai delapan tahun, tarif pajak perusahaan 20 persen setelah periode insentif berakhir, impor barang modal bebas bea, dan tidak ada pembatasan pemulangan modal.

Investor asing mungkin memiliki 100 persen proyek investasi mereka kecuali di sector manufaktur rokok, produksi film, penggilingan beras, penambangan batu permata dan pengolahan, penerbitan dan pencetakan, radio dan televisi, produksi ukiran kayu dan batu, dan tenunan sutra.

Keputusan No. 111 tentang Pelaksanaan (Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Penanaman Modal, yang dikeluarkan pada bulan September 2005, menjelaskan prosedur rinci untuk mendaftarkan Proyek Investasi Berkualitas (Q1P), yang berhak mendapatkan insentif perpajakan tertentu, dengan Dewan untuk Pembangunan Kamboja dan pemerintah provinsi / sub-komite investasi kota. Jumlah perjanjian investasi

²⁶ Jones, C., and Temouri, Y. (2016). *The determinants of tax haven FDI*. *Journal of World Business*, 51 (2), 237 - 250.

internasional yang dimiliki seperti *Financial Action Task Force* (FATF), yang bekerja sama dengan AML/CFT.

Daftar Pustaka

Artikel Jurnal

- Bickel, M., and Breuer, T, "FDI in Land in Developing Countries". *International Journal for Rural Development*, Vol. 43, No. 2., 2009.
- Hill, Hal and Prema-chandra Athukorala. 'Foreign Investment in East Asia: A Survey', *Asian-Pacific Economic Literature*, Vol. 12, No. 2, November 1998
- Xing, Y. and Wan G. *Exchange Rates and Competition for FDI in Asia*. *World Economy*, Vol. 29(4). 2006
- Jones, C., and Temouri, Y. (2016). The determinants of tax haven FDI. *Journal of World Business*, 51 (2), 237 - 250.

Buku

- Organisation for Economic Cooperation and Development. *Foreign Direct Investment and Recovery in Southeast Asia*. Paris: OECD Proceedings, 1999
- Ray, N. & Bloom G. *Lonely Planet Cambodia (Travel Guide)*. Lonely Planet, 2012
- Lindblad, J. Thomas. *Foreign Investment in Southeast Asia in the Twentieth Century*. Basingstoke: Macmillan Press
- Buckley, Peter J. 'The Challenges of the New Economy for Multinational Firms: Lessons for Southeast Asia', in Nick Freeman and Frank Bartels (Eds.), *The Future of Foreign Investment in Southeast Asia*. London: RoutledgeCurzon, 2003.
- Omo K. S. (Ed.) *Southeast Asia s Industrialization: Industrial Policy, Capabilities and Sustainability*. Basingstoke: Palgrave, 2001.
- Bagus Rahmadi Supancana, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia, Jakarta'*. PT. Ghalia Indonesia, 2006
- Hulaman Panjaitan dan Anner Sianipar, *Hukum Penanaman Modal Asing*, Jakarta: CV.Indhill Co, 2008
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008

Lain-Lain

- Vannarith Chheang, "FDI, Services Liberalisation, and Logistics Development in Cambodia", *Eria Discussion Paper Series*. (March 2017), tersedia <http://www.eria.org/ERIA-DP-2016-39.pdf>
- U.S. Department of State, "Cambodia Investment Climate Statement", *Climate Statement*, May, 2015
- Royal Embassy of Cambodia in Washington D.C. (2008): *Information Bulletin November 2008 Volume 34* Available at http://www.embassyofcambodia.org/information_bulletin_vol_34.pdf, diunduh 10/12/2017
- Tucker, H.g. *Foreign Large Scale Investments in Agriculture, Hydropower and Mining: Challenges and Opportunities for Development Cooperation in Laos and Cambodia*. Report prepared for GTZ Lao and the Mekong River Commission (MRC), May 2009
- u.s. department of state: Investment Climate Statement - Cambodia, February 2009. Available

at: <http://www.state.gov/e/eeb/rls/othr/ics/20Q9/117418.html>

Kaliappan, S., Khamis, K., and Ismail, N. Determinants of Services FDI Inflows in ASEAN Countries. *International Journal of Economics and Management*, 2015, 45 - 69. Available at: http://psasir.upm.edu.my/39597/1/Determinants*#?20of%20services%20FDI%20inflows%20in%20Asean%20countries.pdf